

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Relasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam implementasi Program Pamsimas di Kabupaten Purworejo dan terutama di Desa Jetis menunjukkan tidak ada kolaborasi yang seimbang dan sinergis antara ketiganya. Pemerintah, pada tingkat kabupaten/kota maupun desa, menjalankan fungsi sebagai regulator, fasilitator, dan penanggung jawab program. Peran ini mencakup pembinaan dan monitoring pelaksanaan Pamsimas, serta penyelenggaraan kebijakan dan alokasi anggaran. Aspek pendanaan menjadi krusial, dengan dukungan hibah kabupaten, dana dari World Bank, dan suplementasi dari dana desa untuk kebutuhan sarana berskala kecil. Masyarakat yang menjadi anggota KPSPAMS melakukan pengelolaan operasional program secara substantif di tingkat desa, dengan dinas-dinas terkait hanya berperan sebagai pembina.

Keterlibatan pihak swasta dalam ekosistem Pamsimas di Kabupaten Purworejo bersifat parsial dan didasarkan pada diskresi pengelola di masing-masing desa. Peran utama swasta adalah sebagai penyedia barang, dengan contoh kolaborasi seperti antara Desa Pringgowijayan dan perpompaan Wilo yang berlanjut hingga fase keberlanjutan program. Namun tidak semua desa mengadopsi model kerja sama ini seperti Desa Jetis, swasta dan KPSPAMS hanya terlibat transaksi jual-beli saja tanpa terlibat dalam pendanaan program.

Masyarakat, sebagai aktor sentral dalam model berbasis komunitas Pamsimas, menunjukkan tingkat partisipasi yang tidak tinggi pada tahap

implementasi melalui kontribusi tenaga (*in kind*) dan uang (*in cash*). Partisipasi ini mencakup kegiatan seperti pembuatan jamban sehat, namun pembangunan fisik infrastruktur utama lebih banyak dilakukan oleh tenaga profesional yang dianggarkan pemerintah. Di tingkat desa, pengelolaan Pamsimas didelegasikan kepada Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) atau BPSPAMS, yang berkolaborasi dengan Pemerintah Desa dan Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KLM/LKM). KPSPAMS memiliki mandat luas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengoperasian, pemeliharaan, dan keberlanjutan kegiatan. Hal ini berdampak pada kepatuhan masyarakat untuk pembayaran iuran, yang seringkali menunggak, serta kurangnya kesadaran terhadap biaya operasional, terutama listrik, yang dapat menghambat keberfungsian Pamsimas. Hambatan ini menyiratkan perlunya penguatan mekanisme penegakan peraturan dan peningkatan kesadaran kolektif masyarakat untuk menjamin keberlanjutan operasional program.

4.2 Saran

Program Pamsimas di Kabupaten Purworejo menunjukkan keberhasilan dalam membangun relasi antar-pemangku kepentingan pada tahap implementasi awal. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa telah menunjukkan sinergi yang baik, di mana Pemerintah Kabupaten berperan sebagai pembina dan pemantau, sementara Pemerintah Desa aktif dalam penyelenggaraan kebijakan dan anggaran program. Relasi ini diperkuat dengan tidak adanya kendala yang signifikan antara kedua tingkatan pemerintahan tersebut. Partisipasi masyarakat juga terlihat nyata pada tahap implementasi melalui kontribusi tenaga dan dana, yang merupakan

syarat program Pamsimas. KPSPAMS/BPSPAMS yang dibentuk oleh masyarakat berperan penting dalam mengelola pembangunan SPAMS di tingkat desa, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Bahkan, beberapa KPSPAMS telah berhasil menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan pada tahap keberlanjutan, menunjukkan adanya inisiatif dan kemandirian.

Namun, di balik keberhasilan implementasi, kendala dan masalah signifikan timbul terutama pada aspek keberlanjutan program dan relasi dengan masyarakat. Kendala utama adalah penunggakan pembayaran iuran oleh masyarakat, yang membuat pengelola kesulitan menegakkan peraturan. Hal ini diperparah dengan biaya listrik yang tinggi, yang jika tidak dibayar dapat menyebabkan Pamsimas berhenti beroperasi atau "mangkrak". Permasalahan ini menunjukkan kurangnya kesadaran dan disiplin masyarakat dalam menjaga keberlangsungan program. Selain itu, meskipun ada KPSPAMS, sebagian masyarakat hanya melaporkan masalah ke panitia desa, yang kemudian diteruskan ke teknisi, menunjukkan masih adanya jarak dalam keterlibatan langsung masyarakat dalam pemeliharaan. Di sisi swasta, meskipun tidak ada kendala berarti, keterlibatan mereka masih terbatas pada penyedia barang dan tidak semua desa menjalin kerja sama, sehingga potensi dukungan belum sepenuhnya memanfaatkan.

Untuk mengatasi kendala ini dan memperkuat relasi antar-pemangku kepentingan, disarankan beberapa hal berikut:

1. Pemerintah perlu lebih gencar dalam mengedukasi dan mensosialisasikan pentingnya iuran bagi keberlanjutan operasional Pamsimas, serta membantu

KPSPAMS/BPSPAMS dalam menyusun dan menegakkan peraturan yang lebih efektif terkait pembayaran.

2. KPSPAMS/BPSPAMS harus meningkatkan transparansi keuangan dan pengelolaan kepada masyarakat untuk membangun kepercayaan dan mendorong kepatuhan pembayaran.
3. Masyarakat perlu lebih aktif dan bertanggung jawab dalam membayar iuran serta terlibat langsung dalam pemeliharaan kecil.
4. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi kemitraan yang lebih strategis antara KPSPAMS/BPSPAMS dengan pihak swasta, tidak hanya sebatas penyedia barang, tetapi juga dalam bentuk dukungan teknis atau program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu biaya operasional, terutama listrik.
5. Perlu juga dipertimbangkan skema pendanaan yang lebih inovatif dan fleksibel dari lembaga keuangan untuk mendukung keberlanjutan operasional Pamsimas, terutama bagi desa yang belum mampu mandiri sepenuhnya.